

ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019-2023

Muharrom Firmansyah *¹
Selvia Eka Aristantia ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
*e-mail: 08020221071@student.uinsby.ac.id¹, selvia.eka@uinsa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran periode 2019-2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis lima rasio: kemandirian, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan efisiensi. Hasil menunjukkan kemandirian keuangan meningkat hingga 94,55% pada tahun 2023, dan derajat desentralisasi mencapai 41,14% pada tahun 2021, yang termasuk kategori "Baik". Namun, ketergantungan tinggi pada Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih menjadi tantangan. Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 119,35% pada 2021, tetapi fluktuasi efisiensi belanja daerah mengindikasikan perlunya manajemen anggaran yang lebih baik. Implikasi dari penelitian ini adalah Sidoarjo perlu meningkatkan PAD dan efisiensi pengelolaan anggaran untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat serta mencapai kemandirian fiskal berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis fluktuasi efisiensi belanja daerah yang memberikan wawasan tentang tantangan anggaran jangka panjang.

Kata kunci: kinerja keuangan, kemandirian fiskal, pendapatan asli daerah, efisiensi anggaran

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Sidoarjo Regency Government based on the Budget Realization Report for the 2019-2023 period. The method used is quantitative descriptive with an analysis of five ratios: independence, degree of decentralization, regional financial dependence, effectiveness of regional original income, and efficiency. The results show that financial independence has increased to 94.55% in 2023, and the degree of decentralization has reached 41.14% in 2021, which is included in the "Good" category. However, high dependence on Regional Financial Transfers and Village Funds (TKDD) is still a challenge. The effectiveness of managing Regional Original Income (PAD) reached 119.35% in 2021, but fluctuations in regional spending efficiency indicate the need for better budget management. The implication of this study is that Sidoarjo needs to increase PAD and budget management efficiency to reduce dependence on central transfers and achieve sustainable fiscal independence. The novelty of this study lies in the analysis of fluctuations in regional spending efficiency which provides insight into long-term budget challenges.

Keywords: Financial performance, Fiscal independence, Local revenue, Budget efficiency

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat di berbagai bidang, termasuk dalam sektor akuntansi, telah memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan, terutama dalam entitas pemerintahan. Dalam sektor publik, akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dana, kewajiban, dan aset entitas pelapor (Hariyani, 2021). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik (Harahap, 2020). Sejalan dengan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya, terutama terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

(Rohman et al., 2023). Salah satu fokus dalam otonomi daerah adalah pengelolaan dana desa, yang merupakan bagian integral dari upaya mendukung pembangunan dari tingkat pedesaan. Pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa (Sartika, 2019).

Pendapatan daerah yang diatur dalam APBD mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan sah lainnya, sementara pengeluaran terdiri dari belanja aparatur, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tak terduga (Shalehah et al., 2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merupakan alat utama dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah (Mataris & Digdowiseiso, 2022).

Seiring dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja pemerintah daerah menjadi semakin penting. Pengukuran ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Lestari & Salomo, 2022). Kinerja keuangan daerah diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta aset dan kewajiban yang ada (Novikasari & Zulkarnain, 2020). Salah satu indikator utama dari kinerja tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Nasirwan et al., 2024).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sidoarjo (Romadhona, 2024). Selama dua dekade terakhir, Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan serius terkait korupsi yang melibatkan tiga bupati berturut-turut—Win Hendarso, Saiful Ilah, dan Ahmad Muhdlor Ali. Win Hendarso, yang menjabat dari 2000 hingga 2010, terlibat dalam kasus korupsi dana kas desa sebesar 2,3 miliar rupiah, yang menyebabkan ia divonis lima tahun penjara dan didenda 200 juta rupiah. Saiful Ilah, penggantinya, juga terjerat kasus suap pengadaan infrastruktur senilai 660 juta rupiah dan menjalani hukuman tiga tahun penjara. Pada 2023, setelah menjalani hukuman, ia kembali ditahan atas dugaan gratifikasi sebesar 44 miliar rupiah. Bupati saat ini, Ahmad Muhdlor Ali, juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemotongan insentif ASN di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) senilai 69,9 juta rupiah. Kasus korupsi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran publik (Panji & Utomo, 2023).

Menurut (Novendri, 2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas. Jika sistem akuntansi di Sidoarjo tidak cukup kuat, hal ini bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan transparansi, yang pada akhirnya bisa menutupi penyimpangan atau manipulasi, seperti yang terjadi dalam kasus korupsi di Sidoarjo. Adapun menurut Zuhri et al. (2022) yang menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang kemungkinan juga terjadi di Sidoarjo, terutama karena kasus korupsi dapat memperburuk efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Selain itu, seperti Pekanbaru yang memiliki kemandirian keuangan rendah dan derajat desentralisasi dalam kategori sedang, Sidoarjo juga mungkin menghadapi tantangan serupa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dikelola dengan baik, sehingga menghambat kemampuan membiayai pembangunan secara mandiri. Efektivitas dan efisiensi PAD yang rendah di Pekanbaru dapat mencerminkan kondisi di Sidoarjo, di mana pengelolaan anggaran yang terhambat korupsi memengaruhi rasio efektivitas PAD dan efisiensi belanja, yang penting untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama periode 2019-2023 dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran sebagai sumber data utama. Periode ini dipilih karena mencakup dua fenomena penting, yaitu dampak pandemi COVID-19 dan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah dan alokasi anggaran, yang sebagian besar dialokasikan untuk penanganan krisis kesehatan (Salim et al., 2022). Selain itu,

kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sidoarjo selama periode tersebut memberikan dampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Romadhona, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menilai bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Sidoarjo selama periode tersebut, baik dalam menghadapi krisis global akibat pandemi maupun tantangan internal seperti kasus korupsi. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam kondisi yang penuh tantangan.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan bidang ilmu yang memfokuskan pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan entitas pemerintah dan lembaga publik. Berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang berorientasi pada profit, akuntansi sektor publik bertujuan untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Menurut Bellinda & Costari (2021), akuntansi sektor publik adalah alat untuk memastikan bahwa manajemen keuangan publik dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu peran utama akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi keuangan yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah pusat, legislatif, dan masyarakat umum. Informasi ini mencakup laporan keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban publik. Hal ini penting untuk memastikan adanya akuntabilitas publik dan untuk menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana publik (Nalle et al., 2022).

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan membandingkan data yang terkandung dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan daerah selama periode tertentu. Tergantung pada tujuan analisis, jenis rasio keuangan yang digunakan dapat bervariasi, dan setiap analisis berpotensi menghasilkan rasio yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan rasio-rasio ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efisiensi pengelolaan anggaran dan kesehatan keuangan daerah. (Sari et al., 2021). Menurut Sari et al. (2021), terdapat berbagai rasio yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, serta rasio pertumbuhan. Rasio kemandirian keuangan mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan dan belanja tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan rasio desentralisasi menunjukkan tingkat distribusi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, rasio ketergantungan keuangan menggambarkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, sementara rasio efektivitas pendapatan asli daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan lokal. Di samping itu, rasio efisiensi pendapatan asli daerah menggambarkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan rasio pertumbuhan menunjukkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah dari tahun ke tahun. Rasio-rasio ini diperoleh dari data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya dari Laporan Realisasi Anggaran.

METODE

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Indonesia yang dapat diakses melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup Laporan Keuangan Daerah yang telah diaudit, khususnya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan yang

dianalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2019 hingga 2023. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Tahapan analisis data meliputi beberapa langkah sistematis, dimulai dengan pengumpulan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK, diikuti dengan perhitungan dan pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan yang relevan, seperti rasio kemandirian dan efisiensi. Selanjutnya, hasil perhitungan dianalisis dan dibahas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan serta mengevaluasi tren yang ada selama periode tersebut. Akhirnya, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Definisi Operasional

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mandiri secara finansial. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal, seperti pemerintah pusat dan provinsi, semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal (Abdulaziz, 2021). Berikut adalah cara menghitung rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Adapun Tingkat rasio ini dapat dinilai dengan tingkat persentase pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria	Kemandirian
Instruktif	0%-25%
Konsultatif	>25%-50%
Partisipatif	>50%-75%
Delegatif	>75%-100%

Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Marliani (2022), Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan cara menentukan persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana PAD berkontribusi terhadap keseluruhan penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi secara mandiri. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun persentase rasio ini dalam menghitung kinerja keuangan daerah pada tabel 2 dibawah berikut.

Tabel 2. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Persentase Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10,01%-20%	Kurang
20,01%-30%	Cukup
30,01%-40%	Sedang
40,01%-50%	Baik
>50,01%	Sangat Baik

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah berfungsi untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dengan total penerimaan daerah. Dengan cara ini, rasio tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai proporsi penerimaan daerah yang bergantung pada sumber dana eksternal, di mana semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap dukungan finansial dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan dan belanja daerah (Sari et al., 2021). Semakin tinggi persentase rasio ini, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat atau provinsi (Sari et al., 2021). Berikut adalah cara menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah:

$$Ketergantungan\ Keuangan\ Daerah = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Nilai ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase rasio ini, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Tabel 3 di bawah ini menunjukkan skala interval sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah

Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0-10%	Sangat Rendah
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup
40%-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Rasio Efektivitas PAD

Pada rasio efektivitas menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan pada rencana anggaran pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatannya. Efektivitas terkait dengan tingkat keberhasilan suatu operasi di sektor publik, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif jika berhasil mendukung kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jika realisasi penerimaan PAD melebihi target yang ditetapkan, maka rasio ini dikatakan semakin efektif, dan begitu pula sebaliknya (Zulkarnain, 2020). Berikut cara menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Dalam menilai efektivitas pendapatan asli daerah, kriteria persentase digunakan untuk menginterpretasikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah tabel 4 yang menunjukkan interpretasi efektivitas pendapatan asli daerah:

Tabel 4. Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Rasio Efisiensi Anggaran

Pada rasio efisiensi menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah dengan menghitung perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Menurut (Abdulaziz, 2021) Kinerja keuangan daerah dapat dikategorikan efisien jika hasil efisiensi yang diperoleh kurang dari 100%, yang menunjukkan bahwa semakin kecil persentase hasil efisiensi, maka tingkat efisiensi semakin baik. Sebaliknya, jika persentase efisiensi cenderung tinggi atau melebihi 100%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dianggap tidak efisien. Dengan demikian, analisis terhadap hasil efisiensi ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan pemerintah daerah, penilaian dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan. Berikut adalah metode untuk menghitung rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai efisiensi pendapatan asli daerah, pengukuran rasio PAD dapat dilihat di tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
<60%	Sangat Efisien
60%-80%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan proses evaluasi terhadap tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah selama periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja, yakni Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data tersebut, akan dilakukan analisis untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis rasio tersebut kemudian akan memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian, desentralisasi, ketergantungan keuangan, efektivitas pengelolaan PAD, dan di Kabupaten Sidoarjo.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengindikasikan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik melalui pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Rasio ini mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangan tanpa bergantung pada sumber eksternal. Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo selama periode 2019-2023 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah		%	Kriteria
	Realisasi Total PAD	Realisasi TKDD		
2019	1.689.950.000	2.103.680.000	80,33%	Delegatif
2020	1.798.520.000	2.097.430.000	85,75%	Delegatif
2021	1.921.240.000	2.031.970.000	94,55%	Delegatif
2022	1.801.980.000	2.234.100.000	80,66%	Delegatif
2023	2.050.790.000	2.366.270.000	86,67%	Delegatif

Data kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi dalam tingkat kemandirian fiskal berdasarkan perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Persentase kemandirian keuangan berkisar antara 80,33% hingga 94,55%, dengan kategori delegatif yang menandakan ketergantungan signifikan pada transfer pusat. Pada tahun 2021,

tingkat kemandirian mencapai puncaknya di 94,55%, menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan lokal secara mandiri. Namun, pada tahun 2022 persentase ini kembali menurun menjadi 80,66%, sebelum naik kembali menjadi 86,67% pada 2023. Realisasi PAD dan TKDD mengalami peningkatan selama periode tersebut, tetapi data menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat, Kabupaten Sidoarjo masih belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada bantuan fiskal dari pemerintah pusat. Analisis ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam kinerja keuangan, kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional secara mandiri masih terbatas oleh besarnya kontribusi TKDD.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menggambarkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Hasil perhitungan rasio tingkat desentralisasi ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Derajat Desentralisasi		%	Kriteria
	Realisasi Total PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah		
2019	1.689.950.000	4.444.630.000	38,02%	Sedang
2020	1.798.520.000	4.411.620.000	40,77%	Baik
2021	1.921.240.000	4.669.640.000	41,14%	Baik
2022	1.801.980.000	4.504.850.000	40,00%	Baik
2023	2.050.790.000	5.020.200.000	40,85%	Baik

Data derajat desentralisasi Kabupaten Sidoarjo periode 2019-2023 menunjukkan kemampuan daerah dalam mendanai pengeluaran publiknya sendiri berdasarkan perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Persentase derajat desentralisasi berkisar antara 38,02% hingga 41,14%, dengan kriteria "Sedang" pada tahun 2019 dan "Baik" pada tahun 2020-2023. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 ketika persentase derajat desentralisasi mencapai 40,77%, menunjukkan peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Meski terjadi fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, derajat desentralisasi tetap berada dalam kategori "Baik", yang mengindikasikan peningkatan otonomi fiskal daerah. Pada tahun 2021, derajat desentralisasi mencapai puncaknya di 41,14%, namun sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya, meski tetap di atas 40%. Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo mulai menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal dalam pembiayaan kegiatan daerah, meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat desentralisasi yang lebih optimal.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh suatu daerah dengan total penerimaan daerah tersebut. Rasio ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau sumber lain di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal. Perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Ketergantungan Daerah		%	Kriteria
	Realisasi TKDD	Realisasi Total Pendapatan Daerah		
2019	2.103.680.000	4.444.630.000	47,33%	Tinggi
2020	2.097.430.000	4.411.620.000	47,54%	Tinggi
2021	2.031.970.000	4.669.640.000	43,51%	Tinggi
2022	2.234.100.000	4.504.850.000	49,59%	Tinggi
2023	2.366.270.000	5.020.200.000	47,13%	Tinggi

Dapat dilihat pada tabel 8 data ketergantungan daerah Kabupaten Sidoarjo periode 2019-2023 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat, dengan persentase ketergantungan yang berkisar antara 43,51% hingga 49,59%. Pada tahun 2019, ketergantungan berada di angka 47,33% dan sedikit meningkat menjadi 47,54% pada tahun 2020. Pada 2021, ketergantungan menurun menjadi 43,51%, menandakan sedikit peningkatan otonomi fiskal, namun kembali naik signifikan pada tahun 2022 mencapai 49,59%, angka tertinggi dalam periode ini. Pada 2023, meskipun ketergantungan sedikit menurun menjadi 47,13%, angka ini tetap berada dalam kategori tinggi. Keseluruhan data mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan pada tahun-tahun tertentu, Kabupaten Sidoarjo masih sangat bergantung pada transfer fiskal pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan fiskal dan mencapai kemandirian keuangan yang lebih optimal.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dengan membandingkannya terhadap target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini mencerminkan efisiensi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pendapatan yang sesuai dengan potensi ekonominya. Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Efektivitas		%	Kriteria
	Realisasi Total PAD	Total Anggaran PAD		
2019	1.689.950.000	1.603.000.000	105,42%	Sangat Efektif
2020	1.798.520.000	1.810.100.000	99,36%	Cukup Efektif
2021	1.921.240.000	1.609.820.000	119,35%	Sangat Efektif
2022	1.801.980.000	1.816.970.000	99,18%	Cukup Efektif
2023	2.050.790.000	1.913.140.000	107,19%	Sangat Efektif

Dapat dilihat pada tabel 9 data efektivitas keuangan Kabupaten Sidoarjo periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan sebagian besar tahun mencatat kinerja yang baik. Pada tahun 2019, efektivitas mencapai 105,42%, tergolong "Sangat Efektif" karena realisasi PAD melampaui target. Namun, pada tahun 2020, efektivitas menurun menjadi 99,36%, atau "Cukup Efektif," di mana realisasi PAD sedikit di bawah target anggaran. Pada tahun 2021, efektivitas meningkat signifikan menjadi 119,35%, menunjukkan capaian tertinggi dalam periode penelitian ini. Meski pada 2022 efektivitas kembali menurun menjadi 99,18%, kinerjanya tetap berada dalam kategori "Cukup Efektif". Pada 2023, efektivitas naik lagi menjadi 107,19%, kembali ke kategori "Sangat Efektif". Secara keseluruhan, pengelolaan PAD di Kabupaten Sidoarjo selama periode ini cukup efektif, meskipun ada beberapa penurunan di tahun-tahun tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kinerja keuangan daerah yang stabil dan mampu mendukung pembangunan.

Rasio Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi anggaran daerah menggambarkan tingkat kinerja keuangan daerah dengan mengukur perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Untuk menilai tingkat efisiensi keuangan daerah, perhitungan dilakukan dengan membandingkan total pengeluaran dengan pendapatan daerah yang berhasil direalisasikan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara efektif, dengan fokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia. Hasil perhitungan rasio efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Rasio Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Efisiensi		%	Kriteria
	Realisasi Total Belanja Daerah	Realisasi Total Pendapatan Daerah		
2019	4.344.720.000	4.444.630.000	97,75%	Kurang Efisien
2020	4.430.660.000	4.411.620.000	100,43%	Tidak efisien
2021	4.936.100.000	4.669.640.000	105,71%	Tidak efisien
2022	4.849.910.000	4.504.850.000	107,6%	Tidak efisien
2023	5.001.780.000	5.020.200.000	99,63%	Kurang Efisien

Dapat Dilihat dari tabel 10 data efisiensi yang diukur dari realisasi total belanja daerah dan total pendapatan daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2019, efisiensi tercatat sebesar 97,75%, mengindikasikan kinerja yang kurang efisien. Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan peningkatan efisiensi dengan masing-masing nilai 100,43% dan 105,71%, yang mengindikasikan ketidak efisienan, di mana belanja daerah melebihi pendapatan daerah. Pada tahun 2022, efisiensi meningkat lebih lanjut menjadi 107,66%, menunjukkan pengeluaran yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Terakhir, tahun 2023 mencatat efisiensi sebesar 99,63%, yang kembali tergolong kurang efisien. Temuan ini menekankan tantangan yang dihadapi Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai pengelolaan anggaran yang optimal, serta perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengatur belanja daerah agar sejalan dengan pendapatan yang diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, selama periode 2019-2023, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian keuangan menunjukkan tren positif dengan persentase yang berkisar antara 80,33% hingga 94,55%, namun ketergantungan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tetap signifikan, terutama pada tahun 2022. Derajat desentralisasi yang baik memperlihatkan kemajuan dalam pendanaan pengeluaran publik oleh daerah, namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih perlu ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan PAD menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan capaian tertinggi pada 2021, namun terdapat penurunan di beberapa tahun, dan efisiensi anggaran masih menghadapi tantangan, terutama terkait pengelolaan belanja daerah yang kadang melebihi pendapatan.

Temuan ini menunjukkan kontribusi teoritis dengan menggarisbawahi pentingnya penguatan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Penelitian ini juga menambah pemahaman tentang dampak pandemi COVID-19 dan kasus korupsi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam konteks Kabupaten Sidoarjo. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup lima tahun dan terbatas pada satu daerah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan daerah dan periode penelitian, serta mempertimbangkan variabel lain seperti kualitas belanja daerah dan dampak dari reformasi tata kelola keuangan daerah agar analisis lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N. S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. *SeNAPaN*, 1(2), 649–659.
- Bellinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2024). *APBD*. <https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Data/Apbd>.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Hariani, S. (2021). Analysis Of Regional Government Financial Performance In South Nias District. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 3(3). www.ijmsssr.org
- Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal MODERAT*, 8(4).
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 Nenda Marliani. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 14(1).
- Mataris, H., & Digidowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(1).
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sanbein, D. S. (2022). Regional financial performance analysis north central timor district. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Nasirwan, Puspita, Y. A., Tarigan, D. G. S., & Setiawan, F. (2024). The Influence of Regional Financial Independence Ratio, Pad Efficiency Ratio, and Pad Effectiveness Ratio on Regional Income of Bandung City. *Economic: Journal Economic and Business*, 3(4), 172–178.

- Novendri, I. Y. (2024). Pengaruh E-Budgeting, Pengendalian Internal, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/ja.v12i1.4182>
- Novikasari, L., & Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2).
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, & Aristantia, S. E. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(3).
- Romadhona, S. (2024, April 26). *Lagi, Bupati Sidoarjo Terjerat Kasus Korupsi, Ini Kata Pakar Umsida*. Umsida.Ac.Id.
- Salim, R. R., Haliah, & Nirwana. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *JIMAK: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUUSAHAAN*, 1(3), 2809–2406.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. In *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* (Vol. 7). www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Shalehah, S. R., Handiani, S., Wahyunita, T., Nurul Faizah, M., Oktaviana, Y., & Riset Ekonomi, L. (2022). Analysis of Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, and Growth Ratio in Lombok Central Regency Budget Realization Report. *Journal of Finance, Economics and Business (JFEB)*, 1(1). <https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/feb>
- Zuhri, M. A., Pratama, A., & Purba, R. B. (2022). An Analysis of Decentralization, Regional Dependence, Regional Independence, Effectiveness and Efficiency of Pad, Expenditure Efficiency, and Shopping Harmony in Assessing Regional Financial Performance (Case Study in Government Pekanbaru City). *Rowter Journal*, 1(2), 115–126. <https://doi.org/10.33258/rowter.v1i2.691>
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *CAKRAWALA*, 3(1).